

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PEMANDU PELAYARAN KAPAL TONGKANG DI SUNGAI KALINAPU DESA KALANIS KABUPATEN BARITO SELATAN

Akhmad Gudavi¹, Reno Affrian², Jumaidi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: gudavistaamt@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah adanya karyawan pemandu yang tidak melaksanakan kebijakan keselamatan kerja, Kurangnya ketersediaan fasilitas (alat perlindungan diri) dan Tidak adanya (SOP) dalam penyelenggeraan (K3). Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pemandu Pelayaran Kapal Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan dan Faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil dari penarikan *purposive sampling* yang berjumlah 9 orang informan. Setelah data terkumpul lalu di analisis dengan kondensasi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Uji kridibilitas data penelitian ini yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan melakukan *member check*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih belum terimplementasi dengan baik dilihat dari aspek yakni: Pertama; Anggaran tergolong kurang baik karena terbatas dan belum mencukupi. Kedua; Fasilitas tergolong kurang baik dan belum sepenuhnya disediakan oleh instansi terkait. Ketiga; Sikap pelaksana tergolong kurang baik dan sebagian saja yang menerima. Keempat; (SOP) tergolong tidak baik karena belum dimiliki oleh instansi terkait. Kelima; Koordinasi Antar Lembaga tergolong kurang baik dan jarang dilakukan karena tidak ada tindak lanjutnya usulan yang dilakukan oleh instansi terkait. Sedangkan kegiatan yang sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik yaitu Pertama; Kejelasan sudah disampaikan dengan jelas sebelum aktivitas dilakukan. Kedua; Konsistensi sudah disampaikan dengan konsisten setiap kali sebelum aktivitas dilakukan. Ketiga; Staf sudah tergolong baik karena sudah memadai dan tercukupi. Faktor Penghambat Pertama yaitu; Kurangnya ketersediaan anggaran. Kedua yaitu; Kurangnya Koordinasi antar lembaga. Faktor Pendukung Pertama yaitu: Adanya komunikasi antar petugas. Kedua yaitu: Adanya Penyelenggaraan yang sudah dilakukan dengan konsisten. Ketiga yaitu: Jumlah staf yang sudah tercukupi. Agar penerapan (K3) berjalan optimal, disarankan kepada: Direktur disarankan untuk mengalokasikan anggaran guna menyediakan fasilitas (K3) yang lengkap bagi seluruh karyawan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait melalui pertemuan rutin dan sosialisasi (K3). Kepala Pelaksana dan Petugas lainnya diharapkan tidak hanya mengkoordinasikan proses pemanduan, tetapi juga keselamatan kerja dan melaporkan potensi bahaya kerja. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan merekomendasikan dan meminta perusahaan membuat aturan (K3) yang jelas, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, serta meminta perusahaan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan (K3) secara berkala

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

ABSTRACT

This study examines implementation of Occupational Safety and Health (OSH) Management System Policy for barge shipping guides in Kalinapu River, South Barito Regency. A qualitative approach was used, involving interviews, observation, and documentation with nine in mants selected through purposive sampling. Data analysis consisted of condensation, presentation, and verification. Credibility was ensured through observation extension, persistent observation, triangulation, and member checks.

Results indicate suboptimal (OSH) implementation. Budget limitations hinder comprehensive provision of personal protective equipment. Facilities are inadequate, and Standard Operating Procedures (SOPs) are lacking. Implementers' attitudes towards (OSH) are inconsistent, and inter agency coordination is infrequent due to a lack of follow-up on proposals. While clarity and consistency in preactivity communication, and adequate staffing levels were observed, several inhibiting factors were identified: insufficient budget and weak

inter-agency coordination. Supporting factors included inter-officer communication, consistent implementation of some procedures, and sufficient staff.

To improve (OSH), Director should allocate adequate budget for facilities and strengthen inter-agency coordination through regular meetings. Chief Executive and officers must oversee guiding processes and work safety, proactively reporting hazards. Public involvement is crucial, advocating for clear (OSH) rules, a safe work environment, and continuous (OSH) evaluation and improvement. This collaborative approach is essential for a robust (OSH) framework.

Keyword: Implementation, Policies, Occupational Safety and Health

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bidang yang luas dan multidisiplin, berkaitan dengan perlindungan pekerja dan orang lain dari risiko cedera, penyakit, atau kematian akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Secara umum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan potensi bahaya lainnya yang dapat timbul di tempat kerja. Definisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, hingga promosi budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang positif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 menetapkan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan mencegah risiko kecelakaan kerja. Pasal 5 ayat 1-4 secara khusus mengatur kewajiban penerapan SMK3 bagi perusahaan yang memiliki minimal (100) pekerja atau yang bergerak di bidang dengan potensi bahaya tinggi, seperti pertambangan, minyak, dan gas bumi. Perusahaan wajib mematuhi peraturan ini, peraturan terkait lainnya, dan dapat mengadopsi standar internasional untuk memastikan penerapan (SMK3) yang efektif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) memiliki peran krusial dalam industri, tidak hanya untuk mengendalikan potensi risiko kecelakaan kerja, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian materi yang signifikan, mempengaruhi aset perusahaan secara keseluruhan."

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah langkah penting bagi perusahaan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam mengelola potensi bahaya. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekaligus meningkatkan efisiensi perusahaan dan daya saingnya. Dengan penerapan (SMK3) yang baik, insiden yang merugikan dapat dicegah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang wajibkan pengusaha untuk melindungi pekerja dari segala potensi bahaya di tempat kerja.

Selain regulasi pemerintah, terdapat pula landasan hukum yang mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan dan keselamatan saat bekerja. Oleh karena itu, penerapan (K3) di setiap instansi atau perusahaan adalah suatu kewajiban. Pengelolaan (K3) ini harus mencakup berbagai aspek yang terkait dengan jenis usaha, seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur, energi, kimia, serta pelayaran dan kelautan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai bidang tersebut salah satunya dengan bidang pelayaran kelautan, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam pelayaran kelautan karena (K3) dalam pelayaran kelautan adalah keharusan

yang diatur oleh hukum dan etika. Regulasi nasional dan internasional mewajibkan perusahaan pelayaran untuk menerapkan standar (K3) yang ketat demi keselamatan awak kapal, penumpang, dan lingkungan. (K3) bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya dan kelestarian lingkungan laut. Dengan menerapkan (K3) yang baik, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Selain itu dalam pelayaran kelautan pemandu juga merupakan salah satu yang penting karena pemandu pelayaran memiliki peran krusial dalam memastikan keselamatan dan kelancaran pelayaran di laut maupun sungai. Mereka adalah ahli navigasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi perairan, alur pelayaran, cuaca, dan peraturan maritim. Tugas utama pemandu adalah memberikan panduan kepada nakhoda kapal dalam melakukan manuver yang aman dan efisien, terutama di perairan yang sempit, dangkal, atau berbahaya. pemandu berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan sungai dengan memberikan informasi tentang area-area yang sensitif atau berbahaya bagi lingkungan. Dengan demikian pemandu pelayaran adalah faktor penting dalam menjaga keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan, dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi maritim.

Pemandu sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal, kandas, mengenai pesisir dan tubrukan dengan kapal lain, pemandu sangat penting, jika pemandu tidak memiliki keahlian dalam melakukan tugasnya atau tidak ada dalam sebuah pelayaran maka hal serupa bisa saja terjadi. seperti kejadian yang ada di Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebuah tongkang bermuatan batubara menabrak tiga lanting milik warga Akibat kejadian ini terdapat tiga rumah lanting warga yang rusak dan pihak perusahaan memberikan ganti rugi dengan nilai yang sesuai tingkat kerusakan namun para warga kecewa karna kejadian tersebut terus terjadi dan kepala Desa berharap insiden serupa tidak terulang lagi, mengingat aktivitas tongkang batu bara di wilayah tersebut sangat padat. Namun para warga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali karena kerugian yang ditimbulkan cukup signifikan (Sumber: Situs klikkalteng.id,2024).

Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa pemandu pelayaran sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap pelayaran, baik itu dilaut ataupun disungai, salah satunya seperti yang sudah sejak lama berjalan yang berlokasi di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan.

Pemandu pelayaran Agen Tri Sukses Wanatama 1 atau yang biasa disebut dengan (Agen TSW 1) adalah sebuah organisasi kelompok dalam desa yang bergerak di perairan sungai Kalinapu yang berlokasi di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Agen Tri Sukses Wanatama 1 merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemanduan pelayaran kapal tongkang yang di tunjuk oleh PT. Tri Sukses Wanatama sejak tahun 2011 yang lalu sampai sekarang dengan tujuan untuk mempermudah perjalanan kapal tongkang dalam melewati desa yang di mulai dari tempat berangkatnya yaitu Pelabuhan Port Jetty desa Telang Baru sampai ketujuannya yaitu melewati ujung sungai Kalinapu desa Kalanis dan juga sebaliknya bisa dimulai dari memasuki sungai Kalinapu sampai ketujuannya yaitu Pelabuhan Port Jetty desa Telang Baru. pemandu pelayaran tongkang Agen Tri Sukses Wanatama 1 memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan proses pemanduan pelayaran ini sarana dan prasarana pendukungnya yakni: satu unit kapal *assist* berukuran kecil, dua unit speed boat pendorong, dua unit kapal perahu untuk mengawasi jalur sungai pelayaran dan sembilan orang tenaga kerja yakni: pertama; satu orang supir (*driver tug boat*) atau kepala pelaksana, kedua; dua orang pemandu atas tongkang (*pandu barge*), ketiga; dua orang kru kapal *assist*, ke empat; dua orang *driver speed boat* yang terdiri satu

orang per-unit untuk mendorong tongkang dan ke lima; dua orang menggunakan kapal perahu terdiri satu orang per-unit untuk mengawasi jalur sungai agar pelayaran tetap aman, namun kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di pemandu Agen Tri Sukses Wanatama 1 belum terkelola dengan baik, hal ini ditandai oleh :

1. Adanya Adanya pemandu yang tidak menerima kewajiban aturan keselamatan kerja yaitu tidak memakai fasilitas keselamatan kerja yang sudah disediakan. (Sumber Data: Kepala Pelaksana, 2024).
2. Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan kerja seperti pelampung *safety* yang hanya tersedia dua unit, helm *safety*, sepatu *safety* yang masih belum ada sama sekali. (Sumber Data: Data Inventaris, 2024).
3. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai keselamatan kerja menyebabkan karyawan pemandu tidak memiliki pedoman yang memadai dan seperti tidak menggunakan fasilitas keselamatan yang telah disediakan. (Sumber Data: Kepala Pelaksana, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan di tuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PEMANDU PELAYARAN KAPAL TONGKANG DI SUNGAI KALINAPU DESA KALANIS KABUPATEN BARITO SELATAN”**.

METODE

Lokasi penelitian yang diteliti adalah di Sungai Kalinapu, Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73763. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah studi literatur (studi kepustakaan) dan studi lapangan (*Field Research*) adalah yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber data diambil dengan penarikan sampel *purposive sampling* yang berjumlah 9 (sembilan) orang informan sebagai sumber data yang diambil oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teori menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2022:154) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Setelah terkumpulnya data kemudian di analisis dengan teknik menurut Miles dan Huberman dalam (Zuchri Abdussamad, 2021) yaitu kondensasi data, penyajian data dan verifikasi (penarikan kesimpulan) lalu untuk Uji kridibilitas data pada penelitian ini menggunakan cara menurut Sudaryono dalam (Sumarni, 2023) adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan melakukan *member check*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pemandu Pelayaran Kapal Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan

Kesuksesan implementasi bergantung pada suatu faktor yang ditentukan Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2022) terdapat empat macam variabel penentu dalam sebuah kesuksesan implementasi adalah yaitu sebagai berikut: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dan hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sukses tidaknya penerapan kebijakan publik sangat bergantung pada seberapa baik komunikasi dilakukan. Komunikasi yang efektif memastikan semua pihak yang terlibat, terutama pengambil keputusan, memahami langkah-langkah yang harus diambil. Dua aspek krusial yang diteliti dalam konteks ini adalah kejelasan dan konsistensi pesan yang disampaikan.

a. Kejelasan

Kejelasan komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi yang disampaikan haruslah mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi atau himbauan sudah tergolong baik dan informasi atau himbauan sudah disampaikan secara jelas kepada seluruh karyawan pemandu, informasi disampaikan secara langsung sebelum proses pemanduan pelayaran berlangsung melalui briefing (arahan) dan setelahnya pada saat proses pemanduan berjalan informasi disampaikan lagi secara langsung melalui alat komunikasi radio *handy talky*.

b. Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud adalah perintah yang diberikan dalam melaksanakan sebuah komunikasi haruslah konsisten (dijalankan dan diterapkan).

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa konsistensi informasi atau himbauan keselamatan kerja tergolong baik dan sudah disampaikan dan dilakukan secara konsisten, informasi atau himbauan disampaikan kepada seluruh karyawan setiap kali sebelum proses pemanduan pelayaran berlangsung, penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui briefing (arahan) dan setelahnya informasi kembali disampaikan lagi melalui alat komunikasi radio *handy talky*.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Seperti yang ditekankan oleh George C. Edward III, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur, sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas suatu kebijakan.

a. Staf

Personel merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program. Kekurangan jumlah personel, ketidaksesuaian keahlian, atau kurangnya kemampuan personel dapat menjadi penyebab utama kegagalan dalam mencapai tujuan program.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa staf atau petugas sudah tergolong baik staf atau petugas yang terlibat dalam proses pemanduan pelayaran sudah mencukupi, selain itu, semua petugas sudah diperintahkan untuk saling mengingatkan dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja selama proses pemanduan berlangsung.

b. Anggaran

Anggaran merupakan aspek penunjang atau pendukung dalam implementasi kebijakan, dengan anggaran yang tersedia maka aspek-aspek yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Anggaran sangat penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi modal untuk menunjang lancarnya sebuah kebijakan. Tanpa adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi dan memadai sebuah kebijakan tidak akan berjalan lancar dan efektif.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran dana pada (Agen TSW 1) tergolong kurang baik dan anggaran masih terbatas dan belum mencukupi untuk menyediakan fasilitas keselamatan kerja alat perlindungan diri.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan aspek penunjang atau pendukung dalam implementasi kebijakan, dengan fasilitas yang tersedia maka aspek-aspek yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai merupakan tulang punggung keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa dukungan fasilitas yang optimal, pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas masih tergolong kurang baik hal ini diketahui dari seluruh karyawan pemandu hanya disediakan baju *weapack safety*, untuk ketersediaan fasilitas perlengkapan alat perlindungan diri seperti helm *safety*, sepatu *safety* tidak ada sama sekali dan pelampung *safety* yang masih belum disediakan secara menyeluruh pada para karyawan pemandunya.

3. Disposisi

Sikap para pelaksana agar kebijakan berjalan lancar, para pelaksana tidak hanya perlu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus mau dan mampu melakukannya. Sikap mereka sangat penting.

a. Sikap

Sikap yang dimaksud disposisi ini adalah apakah para pelaksana sudah menerima atas kebijakan yang harus ditetapkan, sikap dan kemauan para pelaksana kebijakan sangat krusial dalam keberhasilan implementasi suatu program. Jika personel yang ditugaskan tidak memiliki komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, maka akan muncul berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana atau karyawan pemandu tergolong kurang baik karena sebagian sudah menerima dan mematuhi himbauan yang diberikan namun sebagianya ada yang tidak mematuhi sama sekali atas himbauan keselamatan kerja untuk memakai fasilitas yang sudah diberikan

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada. Meskipun sumber daya mencukupi dan para pelaksana memahami serta memiliki semangat untuk menjalankan kebijakan, namun jika struktur birokrasi tidak mendukung, maka pelaksanaan kebijakan dapat terhambat. Kebijakan yang kompleks memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai pihak. Struktur birokrasi yang tidak kondusif akan menghambat efektivitas pemanfaatan sumber daya dan motivasi para pelaksana, sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai. Sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan, birokrasi harus mampu mendukung kebijakan politik dengan melakukan koordinasi yang efektif.

a. Standar Operating Procedures (SOP)

Standar Operating Procedures (SOP) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur yang dilakukan apabila kebijakan tersebut dijalankan ataupun dilanggar, *Standar Operasional Prosedur* merupakan panduan tertulis yang berisi urutan langkah-langkah kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa *standar operating procedure* (SOP) keselamatan kerja pada para pemandu pelayaran (Agen TSW 1) tergolong tidak baik karena belum adanya prosedur khusus dalam penyelenggaraan keselamatan kerja sehingga membuat para karyawan atau pemandu tidak memiliki pedoman yang baik dalam melaksankannya, namun direktur dan kepala pelaksana sudah memerintahkan dan memberi himbauan kepada semua karyawan pemandu agar mengutamakan keselamatan kerja.

b. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi Antar Lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apakah ada koordinasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan, koordinasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan sebagai aktivitas program kepada lembaga terkait, demi

mendukungnya suatu implementasi kebijakan agar efektif.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan lembaga terkait mengenai keselamatan kerja bagi karyawan atau pemandu tergolong kurang baik karena masih belum ada, meskipun ada upaya koordinasi sebelumnya oleh direktur, namun tidak ada tindak lanjut yang signifikan hingga saat ini. selain itu, lembaga terkait juga belum memberikan pengawasan yang sama sekali terkait keselamatan kerja, koordinasi yang ada saat ini hanya sebatas pada proses pemanduan pelayaran, tanpa menyentuh aspek penting lainnya yaitu keselamatan kerja bagi para karyawan pemandu.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pemandu Pelayaran Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan

Dalam pelaksanaan kebijakan selalu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu pelaksanaan kebijakan, terutama dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pemandu Pelayaran Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Implementasi program tersebut adalah:

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Ketersediaan Anggaran

Sumber daya yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi terdiri anggaran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi modal untuk menjamin lancarnya kebijakan. Tanpa adanya anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan lancar dan efektif.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya ketersediaan anggaran menjadi kendala utama dalam menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang lengkap dan memadai. Hal ini disebabkan karena belum adanya tindak lanjut dari pihak pusat terkait usulan yang diajukan sebelumnya, sehingga anggaran yang ada masih belum mencukupi. Kurangnya anggaran ini berdampak pada kurangnya ketersediaan alat perlindungan diri yang masih belum lengkap, sehingga ketersediaan anggaran dapat dikatakan belum efektif.

b. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Struktur Birokrasi merupakan sebuah kunci keberhasilan implementasi kebijakan, struktur birokrasi yang tidak baik dapat menghambat koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar lembaga terkait keselamatan kerja di (Agen TSW 1) masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya, sehingga belum ada pengawasan dari lembaga terkait untuk memastikan keselamatan kerja di lokasi tersebut. akibatnya, baik penekanan maupun penerapan keselamatan kerja belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya dukungan dan pengawasan dari pihak pusat, yang juga menyebabkan para pemandu mengabaikan aturan keselamatan kerja yang ada.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Komunikasi Antar Petugas.

Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik. Para pengambil keputusan harus memahami dengan jelas apa yang harus mereka lakukan agar implementasi berjalan efektif. Hal ini hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang baik,

yang memastikan bahwa setiap keputusan dan peraturan kebijakan dikomunikasikan kepada personel yang tepat dengan informasi yang akurat, tepat, dan konsisten.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Agen Tri Sukses Wanatama 1, informasi (K3) disampaikan secara langsung kepada seluruh karyawan pemandu melalui *briefing* (arahan) dan alat komunikasi radio *handy talky*.

b. Adanya Penyelenggaraan yang sudah dilakukan dengan konsisten

Penyelenggaraan yang sudah dilakukan dengan konsisten adalah penyelenggaraan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak berubah-ubah. Hal ini dapat berupa penyelenggaraan kegiatan atau program yang dilakukan secara rutin, teratur, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan keselamatan kerja secara terus-menerus melalui himbauan kebijakan (K3) yang dilakukan secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kebiasaan, dan mengubah perilaku karyawan pemandu terhadap keselamatan kerja. hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah karyawan yang melaksanakan (K3) dari hanya satu sampai dua orang pada awal penerapan kebijakan menjadi lebih dari setengah seluruh karyawan pemandu saat ini.

c. Jumlah staf yang sudah tercukupi

Staf adalah sumber daya manusia atau aktor yang melaksanakan kebijakan di lapangan. mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat atau kelompok sasaran kebijakan, sehingga efektivitas implementasi sangat bergantung pada kemampuan dan kinerja mereka.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa jumlah staf yang mencukupi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan kebijakan keselamatan kerja, ketersediaan staf yang cukup memastikan bahwa semua karyawan pemandu selalu diingatkan tentang kebijakan keselamatan kerja yang telah ditetapkan melalui himbauan rutin sebelum pemanduan, sehingga tercipta budaya saling mengingatkan antar karyawan pemandu mengenai pentingnya keselamatan kerja, selain itu juga mendorong karyawan pemandu lainnya untuk mengikuti himbauan penggunaan fasilitas keselamatan kerja, terbukti dengan meningkatnya jumlah karyawan pemandu yang menggunakan fasilitas keselamatan kerja, berbeda dengan sebelumnya yang hanya satu hingga dua orang saja yang mematuhi himbauan keselamatan kerja.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian pada Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemandu Pelayaran Kapal Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan masih belum terimplementasi dengan baik hal dilihat dari aspek yakni: Pertama; Sumber Daya yaitu Anggaran tergolong kurang baik karena terbatas dan belum mencukupi. Kedua; Sumber Daya yaitu Fasilitas tergolong kurang baik dan belum sepenuhnya disediakan oleh instansi terkait. Ketiga; Disposisi yaitu Sikap pelaksana tergolong kurang baik dan sebagian saja yang menerima. Keempat; Struktur Birokrasi yaitu *Standar Operating Procedure* (SOP) tergolong tidak baik karena belum dimiliki oleh instansi terkait. Kelima; Struktur Birokrasi yaitu Koordinasi Antar Lembaga tergolong kurang baik dan jarang dilakukan karena tidak ada tindak lanjutnya usulan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Sedangkan kegiatan yang sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik yaitu Pertama; Komunikasi yaitu Kejelasan sudah disampaikan dengan jelas sebelum aktivitas dilakukan. Kedua; Komunikasi yaitu Konsistensi sudah disampaikan dengan konsisten setiap kali sebelum aktivitas dilakukan. Ketiga; Sumber Daya yaitu Staf sudah tergolong baik karena sudah memadai dan tercukupi.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemandu Pelayaran Kapal Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan terdiri dua faktor yaitu faktor penghambat dan pendukung. Faktor Penghambat, Pertama yaitu; Faktor Penghambat, Pertama yaitu; Kurangnya Ketersediaan Anggaran. Kedua yaitu; Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga. Faktor Pendukung, Pertama yaitu: Adanya Komunikasi Antar Petugas. Kedua yaitu: Adanya Penyelenggaraan yang sudah dilakukan dengan konsisten. Ketiga yaitu: Jumlah staf yang sudah tercukupi.

Agar Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemandu Pelayaran Kapal Tongkang di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan, terlaksana dengan dan optimal disarankan kepada:

1. Direktur agar dapat mengalokasikan anggaran guna menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lengkap bagi seluruh karyawan pemandunya. upaya ini dapat diwujudkan dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama pemanduan pelayaran yang dilakukan dengan tujuan adalah untuk memastikan bahwa seluruh karyawan pemandu memiliki perlindungan yang memadai serta mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang aman dan nyaman selama kegiatan dilakukan. Dan juga Direktur (Agen TSW 1) untuk mengatasi kurangnya koordinasi antar lembaga terkait keselamatan kerja di (Agen TSW 1), perlu dilakukan beberapa hal seperti komunikasi dan koordinasi harus ditingkatkan lebih dekat lagi melalui pertemuan rutin, baik itu tentang proses pemanduan pelayaran atau penyampaian potensi bahaya kerja, selain itu direktur (Agen TSW 1) perlu mengadakan sosialisasi tentang keselamatan kerja dengan mengundang pihak pusat atau membangun komitmen dengan menyampaikannya secara konsisten agar mendapat perhatian ataupun dukungan dari pihak pusat dalam menyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Kepala Pelaksana dan Petugas lainnya agar pada setiap proses pemanduan berlangsung diharapkan untuk tidak hanya mengkoordinasikan tentang proses berjalannya pemanduan yang dilakukan saja, tetapi juga disarankan agar mengkordinasikan keselamatan kerja dan melaporkan potensi bahaya kerja kepada pihak terkait pada saat proses pemanduan berjalan.
3. Masyarakat agar dapat merekomendasikan dan meminta perusahaan untuk membuat aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang jelas dan mudah dimengerti semua orang. Selain itu masyarakat bisa mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, misalnya dengan memastikan adanya alat perlindungan diri yang berfungsi, serta meminta perusahaan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Anonim, 1970 Undang–undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Anonim, 2003 Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'IYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Halishah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Leo Agustino (2022) *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeto Bandung.

Miles Matthew B (2014) *Qualitative Data Analysis*. 3rd edn. Singapore: SAGE Asia-Pasifik.

Reno Affrian (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.

Sumarni (2023) *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN KOMBINSI*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Zuchri Abdussamad (2021) *Buku Motode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.